

**EFEKTIVITAS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
TERHADAP KEUANGAN NEGARA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali)**

TESIS

**Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

Dwi Raharjanto

NIM. R 100140002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H. M.Hum.

Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal: Tesis Saudara Dwi Raharjanto

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : Dwi Raharjanto

NIM : R 100140002

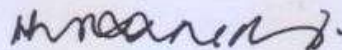
Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul : EFEKTIVITAS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Sukoharjo, 2018
Pembimbing,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H. M.Hum

NOTA PEMBIMBING

Dr. NATANGSA SURBAKTI, S.H. M.Hum.

Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal: Tesis Saudara Dwi Raharjanto

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara:

Nama : Dwi Raharjanto

NIM : R 100140002

Konsentrasi : Hukum Pidana

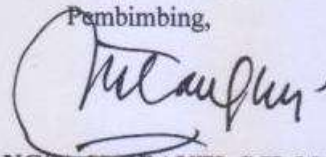
Judul : EFEKTIVITAS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Sukoharjo, 2018

Pembimbing,



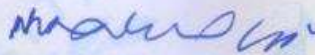
Dr. NATANGSA SURBAKTI, S.H. M.Hum.

TESIS BERJUDUL
EFEKTIVITAS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
TERHADAP KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
DWI RAHARJANTO
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 18 Agustus 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

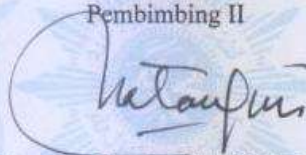
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing I



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

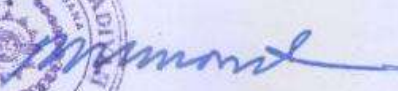
Penguji



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.

Surakarta, 30 Agustus 2019
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sekolah Pascasarjana
Direktur,




Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dwi Raharjanto

NIM : R 100140002

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul : EFEKTIVITAS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
TERHADAP KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini jiplakan, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Sukoharjo, September 2019

Yang membuat pernyataan



Dwi Raharjanto

EFEKTIVITAS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
TERHADAP KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI)

Dwi Raharjanto

Abstrak

Ketentuan pidana pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, memberikan hukuman alternative berupa pidana pengganti terhadap terpidana yang tidak sanggup mengembalikan kerugian Negara. Sebagian besar terpidana korupsi memilih menjalankan pidana pengganti dari pada mengembalikan kerugian Negara. Akibatnya uang Negara yang dikorupsi tidak terpulangkan, hakikat kerugian Negara tidak teratasi. Ini adalah penelitian normative dengan tujuan mengidentifikasi hukum terkait norma-norma yang harus dimasukkan dalam hukum positif. Penelitian ini berhasil merumuskan konsep-konsep norma hukum positif terkait penguatan tindak pidana korupsi. Konsep norma tersebut dipandang mampu melahirkan kembali politik hukum pemberantasan korupsi yaitu meraih keadilan ekonomi.

Kata Kunci : *Norma hukum positif pengembalian kerugian Negara Pemberantasan Korupsi*

ABSTRACT

Criminal provisions for repayment of state financial losses in a criminal act of corruption, which are regulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999, provide alternative penalties in the form of criminal substitutes for convicts who are unable to recover state losses. Most corruption convicts choose to carry out criminal substitutes rather than return state losses. As a result, the corrupted state money is not repatriated, the nature of state losses cannot be overcome. This is a normative study with the aim of identifying laws related to norms that must be included in positive law. This research succeeded in formulating positive legal norm concepts related to strengthening criminal acts of corruption. The concept of the norm is seen as being able to regenerate the law of corruption eradication politics that is achieving economic justice.

Keywords : positive legal norms, restitution of state losses, eradication of corruption

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan ke haribaan Allah SWT, dengan limpahan rahmat dan berkah Allah SWT selesailah tesis ini. Penulisan tesis ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam rangka penelitian dan penulisan tesis ini banyak sekali bantuan dari berbagai pihak terhadap penulis. Untuk itu kami selaku penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik moral, material dan fasilitas terhadap penulis kepada:

1. Dr. Sofyan Anif, M.Si, rektor UMS yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta ini
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, MPd selaku Direktur Pasca Sarjana beserta ibu Wardah Yusufiah, SH, MH, PHD selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini
3. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan serta koreksi dalam penulisan tesis ini
4. Dr. Natangsa Surbati, SH, Mhum, selaku pembimbing pendamping I yang telah memberikan arahan serta koreksi dalam penulisan tesis ini
5. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum., selaku penguji yang telah memberikan arahan dan koreksi terhadap penulisan artikel publikasi dari tesis ini
6. Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan data dan keterangan dalam penelitian ini
7. Pimpinan perpustakaan UMS yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian studi kepustakaan
8. Rekan-rekan mahasiswa di program Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak selayaknya ada dalam tesis ini. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, September 2019
Penulis

Dwi Raharjanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Kajian Tentang Pidana	8
B. Kajian Tentang Keuangan Negara.....	19
C. Kajian Pidana Uang Pengganti Kerugian Negara	24
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Data dan Sumber Data	45
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	50
	A. Hasil Penelitian.....	50
	1. Perkara Korupsi Dana BANSOS APBD Provinsi Jawa Tengah dengan terpidana JOKO MUHAMAD DAHLAN	51
	2. Perkara Korupsi pada kegiatan Rehabilitasi Bendung Penggung Kecamatan Wonosegoro tahun 2011 dengan terpidana HARSONO	60
	B. Hasil Pembahasan.....	66
	1. Penerapan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam pengembalian uang Negara.....	66
	2. Kendala dalam penerapan pidana pembayaran uang pengganti	71
	3. Konsep Pengembalian Keuangan Negara dimasa mendatang	94
BAB V	PENUTUP	114
	A. Kesimpulan	114
	B. Saran dan Rekomendasi	117

DAFTAR PUSTAKA